

Media Briefing Pack

# Refleksi Transisi Energi dan Ambisi Iklim Di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran

Rekomendasi *Energy Transition Policy Development Forum* untuk  
Pemerintahan Prabowo-Gibran

Jakarta, 10 November 2025

Energy Transition Policy Development Forum





## Poin Rekomendasi 2024

1. **Reformasi subsidi energi** menuju skema *direct-targeted subsidy* agar bantuan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.
2. **Perluasan akses energi bersih** di wilayah Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal (3T) melalui pengembangan jaringan mikro dan off-grid.
3. **Pemisahan peran regulator dan operator bisnis** untuk menciptakan efisiensi dan transparansi dalam adopsi energi bersih.
4. **Penguatan koordinasi kelembagaan**, termasuk memperkuat peran DEN dan pembentukan Satuan Tugas Transisi Energi di bawah Presiden/Wakil Presiden.
5. **Pengembangan tata kelola dan kelembagaan Nilai Ekonomi Karbon (NEK)** sebagai instrumen dekarbonisasi sektor energi.
6. **Penegasan komitmen Indonesia** terhadap target global energi terbarukan dan efisiensi energi yang lebih ambisius.
7. **Phase down PLTU** dan pengembangan *carbon sink* sebagai bagian dari strategi dekarbonisasi nasional.
8. **Hilirisasi mineral kritis berstandar lingkungan tinggi** untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan transisi energi berkeadilan.
9. **Integrasi aspek sosial dan GEDSI** dalam strategi transisi energi untuk memastikan keberlanjutan dan inklusivitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

# Jajaran Pembicara

*Refleksi Transisi Energi dan Ambisi Iklim  
Di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran*



**Filda Yusgiantoro**

Ketua Umum  
Purnomo Yusgiantoro  
Center (PYC)



**Fabby Tumiwa**

Chief Executive Officer  
Institute for Essential  
Services Reform (IESR)



**Zacky Ambadar**

Lead - Electric Mobility  
and Indonesia Energy  
International Institute  
for Sustainable  
Development (IISD)



**Ruddy Gobel**

Senior Policy Advisor  
Centre for Policy  
Development (CPD)



**Kuki Soejachmoen**

Direktur Eksekutif  
Indonesia Research  
Institute for  
Decarbonization (IRID)



**Jannata Giwangkara**

Country Lead -  
Indonesia  
Climateworks Centre

A photograph of a train station platform. On the left, a silver train is stopped. The platform has a checkered floor and glass safety barriers. A departure board on the right shows '1 LEBAK BULUS GRAB 10:30' with a clock and the text 'Train is departing'. A red 'STOP' sign is also visible.

# Refleksi Transisi Energi dan Ambisi Iklim Di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran

# Capaian transisi energi 1 tahun pemerintahan Prabowo

- + **Punya komitmen kuat pada Persetujuan Paris dan transisi energi.** Ini disampaikan di berbagai forum nasional dan internasional.
  - KTT G20 Brazil 2024 [19 November, 2024]
  - Joint Statement dengan Presiden Brazil [9 Juli, 2025]
  - Pidato Kenegaraan 2025 [15 Agustus, 2025]
  - Pidato di UNGA [22 September, 2025]
- + **Presiden Prabowo aktif pada kerjasama bilateral dan multilateral untuk mendorong transisi energi.** Namun, implementasi dari komitmen tersebut masih perlu didorong.
- + **Peningkatan target bauran energi terbarukan melalui payung hukum serta penegasan kembali target yang sudah ada:** KEN, RUKN, RUPTL, Peraturan Menteri ESDM No. 10 Tahun 2025 (Peta Jalan Transisi Energi Sektor Ketenagalistrikan), dan Peraturan Menteri ESDM No. 5 Tahun 2025 (Pedoman Perjanjian Jual-beli Tenaga Listrik (PBJL) berbasis Energi Terbarukan).
- + **Sayangnya, target yang ada masih belum ambisius dan tidak sejalan dengan komitmen yang disampaikan Presiden Prabowo.** Misalnya, target bauran 36-40% EBT pada tahun 2040 dalam KEN tidak sejalan dengan janji Presiden Prabowo untuk mencapai 100% energi terbarukan di tahun tersebut atau lebih cepat.
- + **Pada semester pertama tahun 2025, total bauran EBT Indonesia mencapai 16%.** Terdapat tambahan kapasitas pembangkit listrik EBT sebesar 876,5 MW—meningkat 15% dari tahun 2024—meskipun masih jauh dibawah target Persetujuan Paris.
- + **APBN 2026 mengalokasikan Rp402,4 triliun untuk ketahanan energi,** dengan alokasi dana untuk pengembangan energi terbarukan mendapat sekitar Rp37,5 triliun sebagaimana diungkapkan Menkeu, Sri Mulyani, Agustus lalu.

# Tantangan dan prioritas transisi energi pemerintahan Prabowo di tahun ke-2

- + **Perlu adanya harmonisasi antara kementerian dan lembaga untuk mencegah kompleksitas birokrasi dan fragmentasi kebijakan**, terutama sejak Pemerintahan Prabowo mendistribusikan beberapa kewenangan terkait transisi energi yang sebelumnya dipegang oleh Kemenkomarves.
- + **Penguatan payung hukum mengenai pengembangan energi terbarukan**: RUU EBET. Komitmen politik yang kuat didukung oleh payung hukum membuat pengembang dan investor EBT memiliki kepastian hukum yang lebih baik untuk proyek-proyek energi bersih.
- + **Mengintegrasikan strategi pembangunan ekonomi 8 persen dengan akselerasi transisi energi menuju transisi energi berkeadilan**:
  - Fokuskan agenda hilirisasi ke industri energi bersih seperti solar PV (pasir kuarsa), baterai (nikel), electrolyzer, dan hidrogen hijau.
  - Keselarasan regulasi industri dan perdagangan
  - Pembangunan infrastruktur energi pendukung
  - Kesiapan SDM
- + **Perbaiki iklim investasi energi terbarukan dan infrastruktur pendukung** untuk mencapai target USD 40-50 miliar per tahun sejak 2025 (atau total USD 1,3 triliun kumulatif di 2050).
- + **Restrukturisasi sektor ketenagalistrikan**: meningkatkan transparansi perencanaan dan pengadaan energi terbarukan, membagi beban PLN dalam pengembangan energi terbarukan, mengakomodasi perubahan operasi dengan integrasi energi terbarukan.
- + **Penguatan kerangka regulasi untuk percepatan penghentian operasi PLTU batu bara dalam Perpres 112/2022, serta aturan turunannya di Permen ESDM No. 10 Tahun 2025**. Perlu difokuskan pada penyusunan roadmap pensiun dini PLTU secara khusus, bukan sekadar memperbarui roadmap transisi ketenagalistrikan keseluruhan yang sudah tercantum dalam RUKN.
- + **Meningkatkan serta menjamin akses dan kesempatan berbagai aktor dalam memanfaatkan energi terbarukan**, terutama peran pemerintah daerah dan keikutsertaan konsumen energi.



# Tantangan dan prioritas transisi energi pemerintahan Prabowo di tahun ke-2

- + **Sensitivitas Fiskal Tinggi terhadap Fluktuasi Harga Minyak:** setiap kenaikan US\$1 harga minyak mentah → tambahan Rp10T belanja pemerintah pusat; stress test RAPBN 2026 menunjukkan risiko fiskal berbentuk potensi penurunan kontribusi BUMN yang lebih tinggi.
- + **Meningkatnya Tekanan Subsidi Energi:** Rp210,1T pada 2026 (naik 14.5% dari 2025), dengan LPG 3kg sebagai komponen terbesar.
- + **Tarif Listrik Tertahan:** R1 450VA tetap Rp415/kWh, jauh di bawah keekonomian (>Rp1.400/kWh); subsidi listrik naik menjadi Rp104,6T pada 2026.
- + **Akurasi Penyaluran Subsidi Belum Dioptimalkan:** memanfaatkan ketersediaan basis data paling mutakhir untuk meningkatkan akurasi distribusi.
- + **Penurunan Adopsi Kendaraan Listrik:** insentif dicabut 2025 → penjualan tersendat dari 60–70 ribu (2024) ke 11–12 ribu unit (2025).
- + **Ketergantungan pada Energi Fosil** dalam bauran energi primer masih tinggi. Bauran EBT saat ini berkisar 15%, meningkat tipis dalam dua tahun terakhir: 16% (2024) dan 17% (2023), sedangkan target bauran energi baru terbarukan adalah 36-40% EBT pada tahun 2040 di dalam KEN.

# Reformasi kebijakan dan peraturan yang diperlukan dalam menyukseskan transisi energi

## + Reformasi Subsidi Energi

Skema subsidi saat ini tidak tepat sasaran dan membebani APBN. Pemerintah perlu mengalihkan subsidi dari komoditas ke penerima manfaat langsung melalui digitalisasi, dengan skema progresif berbasis kemampuan ekonomi. Tujuannya: jaminan akses energi modern tanpa distorsi harga, efisiensi konsumsi, dan ketahanan fiskal.

## + Konsolidasi Lintas Kementerian & Komunikasi Publik

Gagalnya reformasi LPG 3kg awal 2025 menunjukkan lemahnya koordinasi dan komunikasi. Reformasi subsidi harus dirancang dengan perencanaan lintas lembaga, antisipasi dampak sosial, dan strategi komunikasi publik yang transparan.

## + Reformasi Tarif Listrik

Tarif subsidi (R1 450VA Rp415/kWh) jauh di bawah keekonomian (>Rp1.400/kWh), menyebabkan subsidi listrik naik ke Rp104,6T (2026). Tanpa penyesuaian tarif berbasis biaya riil, sinyal harga tetap lemah, investasi EBT terhambat, dan beban fiskal membengkak.

## + Evaluasi Insentif Kendaraan Listrik

Insentif EV terbukti efektif mendorong adopsi, namun penjualan motor listrik tersendat pada 2025 akibat hilangnya insentif. Pemerintah perlu mengevaluasi keberlanjutan dan efektivitas insentif sebagai katalis produksi dalam negeri, agar sejalan dengan target 2 juta mobil & 13 juta motor listrik pada 2030.

## + Sinkronisasi Target & Instrumen Transisi Energi

Target RUKN (44% EBT 2030) dan RUPTL (76% kapasitas baru dari EBT & storage) tidak akan tercapai tanpa reformasi fiskal dan tarif. Kebijakan subsidi dan harga energi harus diselaraskan dengan agenda dekarbonisasi dan pengembangan energi bersih.



# Reformasi Subsidi Energi, Transisi Berkeadilan, dan Inisiasi Efisiensi Energi

## Reformasi Subsidi Energi

1. Segera membuat rancangan implementasi perubahan kebijakan dari subsidi berbasis komoditas, menjadi subsidi bersasaran langsung, dan membuat trajectory-nya.
2. Pertimbangkan untuk pemberian subsidi hanya kepada kelompok miskin dan rentan, menggunakan DTSEN, dengan skenario 30% (28 Juta Keluarga), 40% (37,87 juta Keluarga), 50% (47,1 juta keluarga).
3. Potensi penghematan mencapai Rp 76 triliun s/d Rp 116 Triliun, yang dapat dialihkan untuk program produktif seperti pendidikan, kesehatan dan energi bersih.
4. Untuk mitigasi inflasi sementara, diperlukan bantuan langsung non-tunai yang dapat di top up pada program eksisting seperti bantuan Pangan Non Tunai/Sembako.
5. Mendukung adanya praktik kompetisi pasar yang sehat untuk sektor energi non-PSO.

## Transisi Berkeadilan

1. Unifikasi berbagai kerangka transisi berkeadilan yang saat ini sedang dijalankan berbagai institusi di pemerintahan.
2. Terapkan prinsip transisi yang terintegrasi di seluruh regulasi tingkat tinggi di Indonesia.
3. Kembangkan 'peta jalan aspek sosial dan manusia'.
4. Gunakan Pendekatan 'Impact' First'.
5. Bentuk koordinasi di dalam pemerintah., terutama untuk non-traditional stakeholders.

## Inisiasi efisiensi Energi

1. Pengembangan kapasitas ESCO, melalui ESCO incubation model seperti vertikal konsorsium.
2. Percepat pelaksanaan pengembangan skema pembiayaan melalui KBPU, Credit Guarantee, dan Energy Saving Insurance.
3. Percepatan penyiapan pipeline proyek EE
4. Inisiatif lain termasuk: Bank Led Financing, EE di Kawasan Industri, dan localised guarantee scheme.

# Refleksi ambisi iklim Indonesia

- + **First Biennial Transparency (BTR I) Indonesia** kepada UNFCCC menunjukkan emisi GRK tahun 2021-2022 telah berada di bawah target yang ditetapkan dalam ENDC. Capaian ini didasarkan pada inventarisasi emisi GRK, bukan pada capaian aksi mitigasi atau penurunan emisi GRK
- + Submisi **Second Nationally Determined Contribution (SNDC)** Indonesia pada 27 Oktober 2025; target emisi GRK Indonesia 2035:
  - 1.257.717 tCO<sub>2</sub>e dengan PDB 6,7% atau 9,8% di atas emisi tahun 2019
  - 1.488.866 tCO<sub>2</sub>e dengan PDB 8,3% atau 30% di atas emisi GRK tahun 2019
- + **Upaya dekarbonisasi melalui Nilai Ekonomi Karbon (NEK)** belum membuahkan hasil yang signifikan.
  - Dibuka perdagangan karbon internasional di awal tahun 2025
  - Telah dikeluarkan Peraturan Presiden No. 110/2025 sebagai pengganti dari Peraturan Presiden No. 98/2021
  - Instrumen NEK sebagai pendukung pencapaian NDC dan dilakukan secara desentralisasi di sektor
- + [Keputusan Menteri ESDM No. 296.K/MB.01/MEM.B/2023](#) menetapkan jenis komoditas yang tergolong mineral kritis; termasuk kerangka acuan bagi kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah terkait pengelolaan mineral kritis

# Tantangan dan prioritas ambisi iklim Indonesia

- + Perlu dilakukan **pengkinian dokumen *Second Nationally Determined Contribution (SNDC)***:
  - Sejalan dengan proses teknokratik RPJMN 2030-2034
  - Pemodelan pembangunan ekonomi dan pembangunan sektor yang terintegrasi
- + Ambisi iklim Indonesia dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan **dekarbonisasi di berbagai sektor**:
  - Perencanaan sejalan dengan ambisi iklim untuk mendapatkan akses dukungan internasional
- + Perlu koordinasi antar sektor dalam memastikan ambisi iklim Indonesia, termasuk dalam transisi energi:
  - Diperlukan adanya kepastian dan basis hukum yang kuat, termasuk Undang-Undang untuk mengatur perubahan iklim dan bagaimana pengaturan di berbagai sektor teknis termasuk dalam memastikan transisi energi yang berkeadilan
- + Perlu adanya *safeguard* untuk hilirisasi mineral kritis, khususnya dari sisi lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG), untuk memastikan nilai tambah ekonomi di tingkat lokal.



## Poin Rekomendasi 2025

1. Reformasi subsidi energi menuju skema subsidi langsung berbasis penerima manfaat melalui Data Tunggal Subsidi Energi Nasional (DTSEN) untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan efisiensi fiskal.
2. Perluasan akses energi bersih di wilayah 3T melalui investasi hasil penghematan subsidi untuk pembangunan jaringan mikro, mini, dan off-grid berbasis komunitas dan koperasi.
3. Pemisahan tegas peran regulator dan operator bisnis energi guna meningkatkan transparansi, efisiensi, serta kepercayaan investor terhadap pasar energi nasional.
4. Pembentukan Satuan Tugas Transisi Energi di bawah Presiden untuk memperkuat koordinasi lintas lembaga, menyinergikan kebijakan, dan mempercepat pengambilan keputusan strategis.
5. Perluasan implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) ke sektor industri dan transportasi serta harmonisasi dengan RUU EBET untuk memperkuat kepastian hukum dekarbonisasi.
6. Penegasan komitmen dan pembaruan target energi terbarukan dalam KEN, RUKN, dan RUPTL agar selaras dengan visi 100% energi terbarukan pada 2040 dan net zero emission pada 2060 atau lebih cepat.
7. Peningkatan investasi riset dan teknologi bersih seperti baterai kendaraan listrik, hidrogen hijau, dan amonia sebagai langkah percepatan transformasi energi dan kemandirian industri nasional.
8. Penerapan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam hilirisasi mineral kritis untuk memastikan manfaat ekonomi berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan.
9. Integrasi aspek sosial, GEDSI, dan kerangka transisi yang adil (Just Transition Framework) guna menjamin perlindungan pekerja, kelompok rentan, dan keberlanjutan sosial dalam proses transisi energi nasional.

“Tahun kedua pemerintahan Prabowo–Gibran akan menjadi titik kritis untuk memastikan reformasi kebijakan energi berjalan konsisten dengan arah dekarbonisasi jangka panjang”

*Energy Transition Policy Development Forum*



# Tentang Penyelenggara



Climateworks Centre menjembatani penelitian dan aksi iklim untuk mendukung transisi sistemik menuju emisi nol bersih di Australia, Asia Tenggara, dan Pasifik. Didirikan pada tahun 2009 oleh Myer Foundation dan Monash University, Climateworks adalah organisasi nirlaba independen yang berperan sebagai penasihat terpercaya. Lembaga ini memberikan panduan kepada para pengambil keputusan dan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengatasi tantangan serta memfasilitasi transisi menuju masa depan yang sejahtera dan bebas emisi. Sejak 2017, Climateworks Centre telah beroperasi di Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai pusat utama dalam upaya menciptakan dampak di kawasan Asia Tenggara.

Jannata Giwangkara  
[egi.giwangkara@climateworkscentre.org](mailto:egi.giwangkara@climateworkscentre.org)





Centre for Policy Development (CPD) adalah lembaga kebijakan nirlaba yang independen dan memiliki staf di Sydney, Melbourne, dan Jakarta.

Pekerjaan kami didorong oleh visi masyarakat yang adil, berkelanjutan, dan ekonomi yang sejahtera yang melayani kebutuhan generasi sekarang dan masa depan di seluruh Australia dan Asia Tenggara.

Misi kami adalah membantu menciptakan perubahan sistem yang transformatif dengan mengembangkan solusi praktis untuk tantangan kebijakan yang kompleks. Kami berkomitmen untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit; bekerja menuju perubahan sistemik jangka panjang yang membuat perbedaan nyata dalam kehidupan masyarakat dan kesehatan planet kita.

Ruddy Gobel  
[ruddy.gobel@cpd.org.au](mailto:ruddy.gobel@cpd.org.au)

# Tentang Penyelenggara



Institute for Essential Services Reform (IESR) adalah organisasi *think tank* (pemikir) yang secara aktif mempromosikan dan memperjuangkan pemenuhan kebutuhan energi Indonesia, dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan kelestarian ekologis.

IESR terlibat dalam kegiatan seperti melakukan analisis dan penelitian, mengadvokasi kebijakan publik, meluncurkan kampanye tentang topik tertentu, dan berkolaborasi dengan berbagai organisasi dan institusi.

Fabby Tumiwa,  
[fabby@iesr.or.id](mailto:fabby@iesr.or.id)

# Tentang Penyelenggara

# Tentang Penyelenggara



International Institute for Sustainable Development (IISD) adalah organisasi think-tank independen yang bertujuan mempercepat pencapaian solusi untuk mewujudkan iklim yang stabil, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan ekonomi yang berkeadilan.

IISD terdaftar sebagai organisasi amal di Kanada, dan telah berstatus 501(c)(3) di Amerika Serikat. Sebagian besar pendanaan operasional IISD berasal dari Provinsi Manitoba. Institut ini juga menerima pendanaan proyek dari berbagai pemerintahan di dalam dan luar Kanada, lembaga-lembaga PBB, yayasan, sektor swasta, dan perorangan.

IISD memiliki lebih dari 120 staf dan 150 associate dan konsultan dari seluruh dunia (termasuk Indonesia) dan dari berbagai disiplin.

Lucky  
[llontoh@iisd.org](mailto:llontoh@iisd.org)

Lontoh



Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID) berfokus dalam upaya-upaya dekarbonisasi dan mendorong terwujudnya masyarakat berketangguhan iklim dan rendah karbon di Indonesia. Melalui analisis legal dan kebijakan, advokasi kebijakan serta peningkatan kapasitas, IRID menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan dan pemangku keahlian, termasuk pemerintah, swasta, akademisi, media, dan kelompok masyarakat sipil, untuk mencari rekomendasi dan solusi yang relevan dan dapat diwujudkan (*doable*) demi mendukung pembuatan kebijakan yang efektif.

IRID berkomitmen untuk terus mempromosikan dekarbonisasi dan pembangunan berketangguhan iklim, salah satunya melalui transisi energi berkeadilan bagi semua.

Kuki  
[kuki.soejachmoen@irid.or.id](mailto:kuki.soejachmoen@irid.or.id)

Soejahmoen

# Tentang Penyelenggara



Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) adalah organisasi nirlaba yang berdedikasi untuk penelitian independen dan mendalam yang bertujuan memberikan solusi kebijakan dan/atau rekomendasi di bidang energi, sumber daya alam, dan pertahanan nasional di tingkat lokal, nasional, dan global.

PYC berfokus pada isu-isu dan tantangan terkini di sektor energi, sumber daya alam, dan pertahanan nasional guna membantu Indonesia memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuannya, PYC memberikan solusi melalui proyek penelitian independen, seminar, lokakarya, konferensi, serta kolaborasi dengan institusi publik dan swasta dalam berbagai studi tentang energi, sumber daya alam, dan pertahanan nasional.

Di sisi sosial, PYC menyelenggarakan berbagai acara yang bertujuan membantu masyarakat dalam bidang kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan. PYC juga mempromosikan warisan lokal dan regional untuk melestarikan budaya tradisional Indonesia.

# Tentang Penyelenggara